

## **ABSTRAK**

# **ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN OLEH ORANG TUA DALAM PENGURUSAN IZIN PENJUALAN TANAH HARTA WARIS ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 199/Pdt.P/2025/PN Blt)**

---

**Oleh**

**Alex Suhartanto  
21107710016**

Studi ini menjelaskan permasalahan mengenai permohonan perwalian oleh orang tua dalam pengurusan izin penjualan tanah harta waris anak di bawah umur. Skripsi ini bertujuan untuk memahami prosedur permohonan dan pertanggungjawaban wali dalam pengurusan izin jual harta waris anak dibawah umur. Serta, untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris melibatkan studi tentang latar belakang, kondisi saat ini, dan interaksi lingkungan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mempelajari aturan hukum yang berlaku serta peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris memanfaatkan data primer sebagai dasar, yang kemudian dipadukan dengan data sekunder yang relevan mengenai permohonan perwalian serta teknik pengumpulan data yaitu dengan metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan permohonan terdiri dari: pertama, tahap administrasi yakni: pemohon membawa surat permohonan, menyerahkan berkas perkara I kepada meja pertama untuk deregister permohonannya, membayar panjar biaya, Petugas Meja Pertama menyerahkan SKUM dan Salinan permohonannya, Pemohon datang untung sidang. Kedua, tahap persidangan yakni Majelis Hakim membacakan permohonannya beserta bukti-buktinya dan mengabulkan permohonan pemohon. Tanggung jawab Wali membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda yang digunakan untuk kepentingan si anak sampai selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam perkara Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PN Blt mengutamakan tujuan hukum yaitu kemanfaatan kemudian memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon. Apabila suatu pemohon ditolak, banyak menimbulkan permasalahan bagi pemohon. Apabila suatu permohonan ditolak, banyak menimbulkan permasalahan bagi pemohon. Apabila suatu permohonan ditolak, banyak menimbulkan permasalahan bagi pemohon. Hal ini dikarenakan penetapan tersebut merupakan syarat administrasi dalam transaksi jual beli.

Kata kunci : Perwalian, Jual Harta, Pertanggungjawaban, Anak

## ABSTRACT

### **Juridical Analysis of Guardianship Applications by Parents in Managing the Sale Permit of Inherited Property Belonging to a Minor (Case Study of Decision Number 199/Pdt.P/2025/PN Blt)**

---

**By:**  
**Alex Suhartanto**  
**21107710016**

*This study explains the legal issues concerning guardianship applications by parents in managing the permit for the sale of inherited land belonging to a minor. This thesis aims to understand the procedures for filing such applications and the responsibilities of guardians in handling the permit for selling a minor's inherited property, as well as to analyze the legal considerations of the judges in Decision Number 199/Pdt.P/2025/PN Blt.*

*The research employs an empirical juridical method. Empirical juridical research involves studying the background, current conditions, and environmental interactions related to the object under study. This type of legal research seeks to examine the applicable legal norms and the legal phenomena occurring within society. The empirical juridical approach utilizes primary data as its main source, complemented by secondary data relevant to guardianship applications. Data collection techniques include field studies and literature review. The data obtained are then processed and analyzed using qualitative analysis.*

*The results of the study indicate that the application process consists of two stages. First, the administrative stage, in which the applicant submits a petition, files the case at the registration desk, pays the court fees, receives the case number (SKUM) and a copy of the petition, and then attends the court hearing. Second, the hearing stage, where the panel of judges reads out the petition along with the submitted evidence and subsequently grants the petition. The responsibility of the guardian is to record all assets belonging to the minor under their care and to document any changes made for the child's benefit until the guardianship period ends, when the child reaches adulthood and can manage their own affairs. The judge's consideration in Decision Number 199/Pdt.P/2025/PN Blt prioritized the objectives of law, particularly benefit, followed by legal certainty and justice for the applicant. If a guardianship application is rejected, it may cause significant difficulties for the applicant, as such a court ruling serves as an administrative requirement in property sale transactions.*

*Keywords: Guardianship, Sale of Property, Responsibility, Child*